

Tingkat ketimpangan antar kabupaten di kepulauan sumba

Yuniarti Reny Renggo

Universitas Kristen Wira Wacana, Sumba.

Email: renyrennggo@unkriswina.ac.id

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui perkembangan tingkat ketimpangan serta mengklasifikasi kemajuan pembangunan ekonomi, agar dapat mengetahui apakah yang menjadi sektor potensial untuk dikembangkan pada setiap kabupaten di kepulauan sumba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Williamso, Tipologi Klasen, analisis *Location Quatiant* (LQ) dan analisis *Shift Share* (SS). Hasil yang diperoleh adalah kabupaten di kepulauan Sumba memiliki ketimpangan yang rendah namun masih tergolong dalam daerah tertinggal dan maju tapi tertekan. Setiap wilayah juga memiliki sektor unggulan yang memliki pertumbuhan cepat dan memiliki daya saing seperti sektor k onstruksi; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa keuangan dan asuransi.

Kata Kunci: Ketimpangan; location quaetiont; shift share

Level of inequality in district in sumba islands

Abstract

The study aims to determine the development of the level of inequality and classify the progress of economic development, in order to find out what are the potential sectors to be developed in each district in the Sumba Island. The method used in this study is the Williamson Index, Typology Klassen, Location Quotient (LQ) analysis and Shift Share (SS) analysis. The results obtained are the districts in the Sumba Island have a low inequality but are still classified as underdeveloped and developed areas but depressed. Each region also has a superior sector that has fast growth and has competitiveness such as the construction sector; wholesale and retail trade; car and motorcycle repair; government administration, defense and mandatory social security; financial and insurance services.

Keywords: *Inequality; location quaetiont; shift share*

PENDAHULUAN

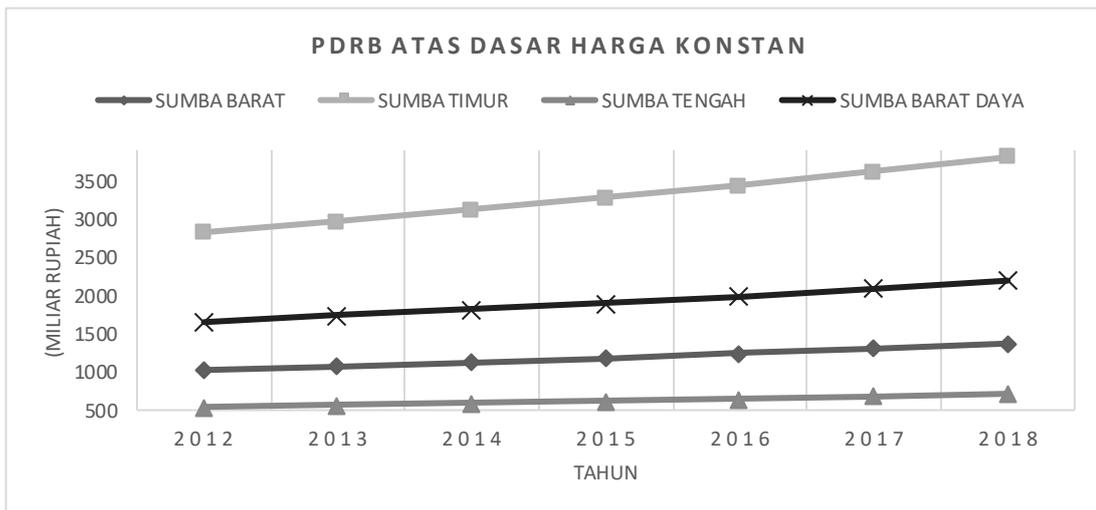
Tujuan dari pertumbuhan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu pertumbuhan ekonomi yang meningkat harus juga diikuti oleh distribusi pendapatan yang lebih merata (Yuliani, 2015). Pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu daerah (Renggo, 2019) dan pertumbuhan ekonomi dianggap berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di tahun sebelumnya (Iswanto, 2015).

Pembangunan ekonomi yang tidak merata akan menyebabkan ketimpangan dan kesenjangan antara daerah (Nugroho, 2014), dimana ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kesenjangan ekonomi merupakan masalah besar yang dialami oleh negara berkembang yang salah satunya adalah Indonesia (Anggiat Mugabe Damanik, Zulgani, 2018).

Topik pembangunan dan isu pemerintah yang menarik di negara berkembang adalah hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi, dimana ketimpangan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya berdampak pada keseimbangan perputaran kegiatan ekonomi (Yuliani, 2015). Sehingga dalam pemerataan pembangunan pemerintah perlu melihat beberapa perbedaan dalam setiap wilayah, antara lain perbedaan budaya, kepercayaan, kekayaan daerah dan lain sebagainya, sehingga perlu ada perlakuan yang berbeda pula (Agusalim, 2016).

Masalah ketimpangan ini pula tidak hanya terjadi pada negara berkembang saja, namun pula pada negara maju. Perbedaan ketimpangannya adalah besar kecilnya tingkat ketimpangan yang terjadi dan cara tingkat kesulitan cara mengatasinya, dimana cara menyelesaikannya dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk (Damanik *et al*, 2018).

Kepulauan Sumba termasuk pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terdiri dari 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Timur, kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Beberapa Kabupaten di Kepulauan Sumba mengalami perkembangan perekonomian yang cukup bagus sejak tahun 2012 hingga tahun 2018, dimana pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat melalui instrument Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Cahyono *et al*, 2019).



Gambar 1. PDRB atas dasar harga konstan 4 Kabupaten di Kepulauan Sumba

Berdasarkan gambar 1 terlihat bahwa pembangunan 4 kabupaten di Kepulauan Sumba mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun peningkatan tersebut tidak sama antara kabupaten. Hal ini terlihat dari tingkat PDRB atas dasar harga konstan yang paling tinggi diperoleh oleh Kabupaten Sumba Timur, sedangkan kabupaten Sumba Tengah memiliki PDRB atas dasar harga konstan paling rendah sejak tahun 2012 hingga tahun 2018.

Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai, dimana semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka akan semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat, namun selain pertumbuhan ekonomi yang menjadi isu penting bagi pembangunan adalah ketimpangan pendapatan (*income inequality*) karena telah terbukti dengan penelitian empiris bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada ketimpangan pendapatan (Amri, 2017).

Ketimpangan antar daerah menunjukkan terjadinya perbedaan tingkat pembangunan, dimana beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat dan beberapa daerah mengalami pertumbuhan yang lambat dan ini bisa menjadi masalah serius (Kurniasih, 2013), hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sumber daya alam dan infrastruktur yang dimiliki oleh masing – masing daerah (Iswanto, 2015). Ketimpangan yang terjadi antar daerah berdampak pada keseimbangan perputaran kegiatan ekonomi yang dapat berpengaruh terhadap ketimpangan kemakmuran antar daerah (Yuliani, 2015).

Berdasarkan latar belakang terlihat bahwa antar 4 kabupaten di kepulauan sumba mengalami perbedaan yang cukup besar dalam PDRB atas dasar harga konstan, walaupun sama-sama memiliki peningkatan. Maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu bagaimana perkembangan tingkat ketimpangan, kemajuan pembangunan ekonomi dan sektor potensial antar 4 kabupaten di kepulauan sumba.

Simon Kuznet mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya, dimana dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional, dan ideologis (Todaro, 200 dalam Saputra, 2016). Faktor – faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain: (1) faktor sumber daya manusia (SDM), (2) faktor sumber daya alam (SDA), (3) faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) faktor budaya, dan (5) faktor sumber daya modal (Cahyono & Almujab, 2019).

Pengukuran pertumbuhan ekonomi biasanya dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (Sukrino, 2006 dalam Agusalm, 2016). Hal ini dikarenakan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional dapat menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output pada waktu tertentu (Renggo, 2019).

Kesenjangan ekonomi antar daerah telah menjadi bahan kajian bagi para pakar ekonomi regional (Saputra et al, 2016) Ketimpangan suatu wilayah ditinjau dari tiga segi yaitu (1) *regional income disparity* lebih bersifat structural, (2) *urban rular income disparity size of distribution on income* lebih disebabkan oleh strategi pembangunan yang bias ke sektor perkotaan sehingga pembangunan daerah pedesaan lebih tertinggal (Gie, 1983 dalam Kurniasih, 2013).

Ketimpangan diakibatkan oleh warisan historis, pembangunan yang selama ini menekankan pada pemerataan pembangunan antar golongan masyarakat, serta belum signifikan dalam memfokuskan pemerataan pembangunan antar wilayah. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan sebagai berikut (malik, 2009 dalam Khairunnisa & Hidayat, 2015):

Perbedaan kandungan sumber daya alam; perbedaan kondisi demografi; kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa; perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi daerah; dan alokasi dana pembangunan antar daerah

Ketimpangan memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif yaitu inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil, sedangkan dampak positifnya adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya (Saragih & Simanullang, 2019).

Perlu untuk menganalisis sektor unggulan dari setiap daerah sehingga dapat dikembangkan oleh masing-masing daerah agar dapat mengurangi ketimpangan yang terjadi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2016), dimana terdapat ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sehingga setiap daerah yang sudah diklasifikasikan dalam setiap kuadran bisa meningkatkan sektor unggulannya masing-masing agar mengurangi ketimpangan

METODE

Penelitian ini akan disajikan dengan bentuk analisis deskriptif kuantitatif, Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari publikasi Badan Pusat Statistik Ptovisi Nusa Tenggara Timur, dari tahun 2012 hingga tahun 2018, karya ilmiah baik jurnal dan lainnya, studi literature dari buku, internet dan sumber lain yang relevan.

Untuk mengetahui perkembangan tingkat ketimpangan antara kabupaten di kepulauan Sumba, menggunakan Indeks Wiliamson (Kuncoro, 2004 dalam Iswanto, 2015):

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 F_i/n}}{Y}$$

Dimana:

- IW = Indeks Williamson
 Y_i = PDRB perkapita di kabupaten i
 Y = PDRB perkapita Provinsi Nusa Tenggara Timur
 F_i = Jumlah penduduk di kabupaten i
 n = jumlah penduduk propinsi

Kriteria Indeks Wiliamson yang digunakan adalah (Kurniasih, 2013):

- indeks > 1 = ketimpangan sangat tinggi
 indeks 0.7 – 1 = ketimpangan tinggi
 indeks 0.4 – 0.69 = ketimpangan sedang
 indeks < 0.39 = ketimpangan rendah

Untuk mengetahui klasifikasi kemajuan pembangunan ekonomi kabupaten di kepulauan sumba, maka menggunakan Tipologi Klassen:

Tabel 1. Klasifikasi typologi klassen

$\frac{y}{r}$	$y_i > y$	$y_i < y$
$r_i > r$	Daerah maju dan cepat tumbuh	Daerah berkembang cepat
$r_i < r$	Daerah maju tapi tertekan	Daerah relatif tertinggal

Keterangan:

- y_i = PDRB perkapita kabupaten
 y = pendapatan total perkapita provinsi Nusa Tenggara Timur
 r_i = laju pertumbuhan total PDRB kabupaten
 r = laju pertumbuhan total PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur

Untuk mengetahui apakah yang menjadi sektor potensial untuk dikembangkan pada setiap kabupaten di kepulauan Sumba, maka menggunakan Analisis Location Quotient (LQ) dengan rumus sebagai berikut:

$$LQ = \frac{V_i/V_t}{Y_i/Y_t} \text{ Pendekatan nilai tambah/pendapatan}$$

Dimana:

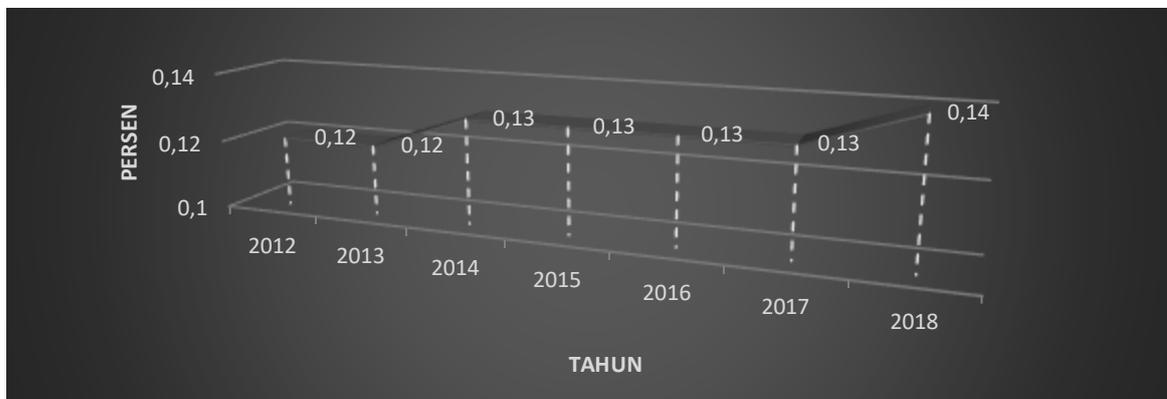
- LQ = besarnya *Location Quotient*
 V_i = nilai PDRB sector i pada tingkat wilayah lebih rendah
 V_t = total PDRB pada tingkat wilayah yang lebih rendah
 Y_i = nilai PDRB sector i pada tingkat wilayah lebih atas
 Y_t = total PDRB pada tingkat wilayah yang lebih rendah

Beberapa kelebihan metode LQ dalam mengidentifikasi komoditas unggulan antara lain dapat digunakan dengan mudah dan sederhana, LQ merupakan suatu alat analisis awal untuk suatu wilayah yang kemudian dapat dilanjutkan dengan alat analisis lainnya, dapat melihat perubahan tingkat spesialis dari setiap sektor, dan pengolahan datanya pun hanya dengan menggunakan excel (R. Jumiyantri, 2018).

Kriteria LQ adalah sebagai berikut (Mangilaleng, Rotinsuhu, & Rompas, 2015):
 Nilai $LQ > 1$, berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di daerah studi k adalah lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi p ; Dengan demikian, sektor i merupakan sektor unggulan daerah studi k sekaligus merupakan basis ekonomi untuk dikembangkan lebih lanjut oleh daerah studi k ;
 Nilai $LQ = 1$, berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di daerah studi k adalah sama dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi p ; dan
 Nilai $LQ < 1$, berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di daerah studi k adalah lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi p . Dengan demikian, sektor i bukan merupakan sektor unggulan daerah studi k dan bukan merupakan basis ekonomi serta tidak propektif untuk dikembangkan lebih lanjut oleh daerah studi k

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti tentang ketimpangan pembangunan, dalam penelitian ini akan jelaskan hasil analisis ketimpangan pembangunan dengan menggunakan alat analisis Indeks Williamson.



Gambar 2. Perkembangan indeks williamson kabupaten kepulauan sumba di provinsi NTT

Pada gambar dua dijelaskan bahwa ketimpangan wilayah di kabupaten kepulauan sumba mengalami ketimpangan yang rendah jika dibandingkan dengan tingkat provinsi. Namun dari tahun ketahun mengalami peningkatan sejak tahun 2013 hingga tahun 2018, walaupun pada tiga tahun terakhir sejak tahun 2015 hingga 2017 mengalami ketimpangan yang sama tanpa adanya peningkatan dan penurunan.

Untuk 4 kabupaten yang ada di kepulauan sumba pun terlihat bahwa Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat merupakan kabupaten yang memiliki ketimpangan yang paling rendah di bandingkan dengan 2 kabupaten lainnya yakni Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Tabel 2. Hasil perhitungan indeks williamson 4 kabupaten di kepulauan sumba

Kabupaten	Indeks Williamson/Tahun							rata-rata IW
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Sumba timur	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Sumba tengah	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Sumba barat	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Sumba barat daya	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,12

Kabupaten-kabupaten di kepulauan sumba pada gambar 2 menunjukkan adanya peningkatan pada ketimpangan pembangunan namun yang paling mempengaruhi adalah adalah Kabupaten Sumba Barat Daya, hal ini terlihat dari tabel 2 dimana Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat tidak mengalami perubahan ketimpangan sejak tahun 2012 – 2018 sedangkan Kabupaten Smba Barat

Daya mengalami perubahan sejak tahun 2012 meningkat pada tahun 2015 dan mengalami peningkatan berikutnya pada tahun 2018.

Walaupun kabupaten-kabupaten Dikepulauan Sumba memiliki ketimpangan yang rendah namun berdasarkan uji tipologi klasen, kabupaten kabupaten di kepulauan sumba masih tergolong dalam daerah yang relative tertinggal.

Kabupaten-kabupaten di kepulauan sumba memang termasuk dalam ketimpangan yang rendah dan itu merupakan poin bagus, namun harus juga melihat bagaimana untuk tidak membuat ketimpangan yang rendah mengalami penurunan tidak bertahan di posisi yang sama. Oleh karena itu harus ada peningkatan dalam berbagai sektor agar mampu menurunkan tingkat ketimpangan. Langkah yang harus dilakukan adalah dengan menentukan sektor unggulan, sehingga sektor tersebut bisa berpotensi untuk di ekspor ke luar wilayah. Untuk menentukan sektor unggulan dalam penelitian ini menggunakan alat analisis LQ dan SS.

Tabel 3. Hasil perhitungan lq kabupaten sumba timur tahun 2012 - 2018

Sektor - Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,85	0,85	0,85	0,86	0,86	0,85	0,85
B - Pertambangan dan Penggalan	1,03	1,00	0,95	0,94	0,91	0,91	0,91
C -Industri Pengolahan	1,06	1,07	1,06	1,05	1,03	1,00	0,97
D - Pengadaan Listrik dan Gas	0,73	0,74	0,72	0,73	0,72	0,72	0,72
E - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,42	0,41	0,40	0,41	0,41	0,41	0,39
F - Konstruksi	1,13	1,16	1,16	1,18	1,17	1,19	1,20
G - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,33	1,32	1,32	1,32	1,33	1,34	1,34
H - Transportasi dan Pergudangan	0,94	0,93	0,92	0,91	0,90	0,88	0,86
I - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,41	0,41	0,41	0,41	0,38	0,38	0,38
J - Informasi dan Komunikasi	0,57	0,57	0,56	0,55	0,54	0,54	0,54
K - Jasa Keuangan dan Asuransi	0,82	0,81	0,81	0,79	0,78	0,79	0,82
L - Real Estate	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70
M,N - Jasa Perusahaan	0,88	0,90	0,90	0,90	0,89	0,90	0,93
O - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,88	0,88	0,89	0,89	0,89	0,92	0,91
P - Jasa Pendidikan	1,49	1,51	1,52	1,53	1,55	1,55	1,59
Q - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,97	0,94	0,93	0,92	0,92	0,91	0,89
R,S,T,U - Jasa lainnya	2,01	1,95	1,90	1,85	1,81	1,71	1,63

Dalam tabel dapat dilihat bahwa rata-rata nilai LQ sejak tahun 2012 hingga tahun 2018 yang masuk dalam komoditas basis atau yang bisa kita sebut sebagai sektor unggulan adalah sektor yang nilai LQnya lebih dari 1. Sektor – sektor tersebut antara lain sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta jasa pendidikan, dikatan sektor basis karena memiliki hubungan yang komparatif dimana hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah akan tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah. Sedangkan sektor-sektor lain termasuk dalam sektor non basis, dikarenakan komoditas tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan dari luar.

Tabel 4. Hasil perhitungan lq kabupaten sumba tengah tahun 2012 – 2018

Sektor - Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,41	1,42	1,41	1,41	1,42	1,41	1,42
B - Pertambangan dan Penggalan	2,33	2,42	2,42	2,48	2,53	2,65	2,73
C -Industri Pengolahan	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,44	0,43
D - Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
E - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13
F - Konstruksi	0,30	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33
G - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,42	0,41	0,40	0,39	0,39	0,40	0,40

Sektor - Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
H - Transportasi dan Pergudangan	0,10	0,10	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10
I - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,21	0,20	0,20	0,19	0,17	0,16	0,16
J - Informasi dan Komunikasi	0,87	0,88	0,89	0,89	0,89	0,88	0,86
K - Jasa Keuangan dan Asuransi	0,38	0,36	0,36	0,35	0,35	0,36	0,35
L - Real Estate	1,04	1,04	1,06	1,08	1,11	1,11	1,11
M,N - Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
O - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,06	2,07	2,08	2,08	2,09	2,14	2,13
P - Jasa Pendidikan	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96	0,96	0,98
Q - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,19	0,18	0,18	0,19	0,19	0,18	0,18
R,S,T,U - Jasa lainnya	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,13

Berdasarkan nilai LQ untuk kabupaten sumba timur maka yang merupaka sektor basis adalah sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; sektor real estate; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sedangkan sektor lainnya merupakan sektor non basis. Seperti sektor jasa pendidikan, merupakan sektor basis pada kabupaten Sumba Timur namun merupakan sektor non basis pada Kabupaten Sumba Tengah.

Tabel 5. Hasil perhitungan lq kabupaten sumba barat tahun 2012 – 2018

Sektor - Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,93	1,57	0,93	0,93	0,94	0,94	0,94
B - Pertambangan dan Penggalian	0,75	0,58	0,76	0,78	0,79	0,82	0,84
C - Industri Pengolahan	1,38	0,50	1,39	1,37	1,36	1,35	1,32
D - Pengadaan Listrik dan Gas	0,85	0,41	0,85	0,85	0,83	0,83	0,86
E - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,13	0,11	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15
F - Konstruksi	0,61	0,39	0,62	0,63	0,63	0,63	0,63
G - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,49	0,93	1,50	1,49	1,49	1,51	1,52
H - Transportasi dan Pergudangan	0,45	0,41	0,45	0,45	0,44	0,43	0,43
I - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,56	0,05	0,57	0,57	0,58	0,59	0,60
J - Informasi dan Komunikasi	0,78	1,34	0,75	0,74	0,72	0,71	0,70
K - Jasa Keuangan dan Asuransi	1,32	0,50	1,30	1,33	1,33	1,35	1,37
L - Real Estate	1,00	0,81	1,02	1,02	1,03	1,03	1,03
M,N - Jasa Perusahaan	0,72	0,03	0,70	0,69	0,69	0,70	0,70
O - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,34	0,95	1,36	1,37	1,36	1,36	1,35
P - Jasa Pendidikan	1,10	0,73	1,06	1,05	1,04	1,04	1,05
Q - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,70	0,81	0,68	0,67	0,68	0,68	0,68
R,S,T,U - Jasa lainnya	0,98	0,39	0,96	0,95	0,94	0,92	0,91

Sedikit berbeda dengan Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Tengah, Kabupaten memiliki lebih banyak sektor yang tergolong sektor basis namun memiliki kesamaan yang sama antara kedua kabupaten tersebut. Kabupaten Sumba Barat memiliki Kesamaan sektor basis dengan Kabupaten Sumba Timur pada sektor basis industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor jasa pendidikan, memiliki kesamaan dengan Kabupaten Sumba Tengah dalam hal sektor basis pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Sedangkan sektor jasa keuangan dan asuransi merupakan salah satu sektor basis dari Kabupaten Sumba Barat yang berbeda dengan Sumba Timu dan Sumba Tengah.

Tabel 6. Hasil perhitungan lq kabupaten sumba barat daya tahun 2012 – 2018

Sektor - Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,55	1,57	1,56	1,54	1,54	1,51	1,49
B - Pertambangan dan Penggalian	0,56	0,58	0,58	0,60	0,61	0,64	0,65

Tingkat ketimpangan antar kabupaten di kepulauan sumba;
Yuniarti Reny Renggo

Sektor - Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
C -Industri Pengolahan	0,51	0,50	0,51	0,50	0,50	0,49	0,48
D - Pengadaan Listrik dan Gas	0,42	0,41	0,42	0,46	0,46	0,47	0,49
E - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
F - Konstruksi	0,40	0,39	0,39	0,41	0,42	0,42	0,43
G - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,91	0,93	0,95	0,97	0,99	1,01	1,02
H - Transportasi dan Pergudangan	0,41	0,41	0,43	0,45	0,47	0,50	0,52
I - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06
J - Informasi dan Komunikasi	1,35	1,34	1,33	1,31	1,30	1,33	1,35
K - Jasa Keuangan dan Asuransi	0,52	0,50	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52
L - Real Estate	0,84	0,81	0,83	0,83	0,84	0,82	0,82
M,N - Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
O - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,95	0,95	0,97	0,98	1,00	1,04	1,04
P - Jasa Pendidikan	0,71	0,73	0,72	0,73	0,73	0,73	0,76
Q - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,80	0,81	0,82	0,83	0,83	0,83	0,83
R,S,T,U - Jasa lainnya	0,39	0,39	0,38	0,39	0,39	0,37	0,36

Berbeda dengan ketika kabupaten lainnya yang ada di kepulauan Sumba, Kabupaten Sumba Barat Daya hanya memiliki dua sektor basis, yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang sama dengan kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat, serta sektor Informasi dan Komunikasi. Sedangkan sektor lainnya merupakan sektor non basis, oleh karena itu Kabupaten Sumba Barat Daya perlu untuk diimport dari luar.

Berdasarkan perhitungan LQ sejak tahun 2012 – 2018 pada tabel 3 – tabel 6, maka dapat dilihat bahwa empat Kabupaten yang ada di kepulauan Sumba memiliki sektor basis dan sektor non basis, yang terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalan; sektor industri pengolahan; sektor konstruksi; sektor perdagangan besar dan eceran; sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor real estate; sektor administrasi pemerintahan, pertahana, dan jaminan sosial wajib; serta sektor jasa pendidikan.

Sektor basis yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten juga ada yang sama dan ada pula yang berbeda, namun semua itu bisa mempermudah bagi kabupaten yang ada di kepulauan Sumba, dimana salah satu kabupaten jika ingin memenuhi kebutuhan sektor non basisnya tidak harus mengimpor dari luar kepulauan, namun bisa di peroleh dari kabupaten yang ada di kepulauan Sumba itu sendiri.

Berdasarkan informasi LQ, maka dapat diketahui sektor yang menjadi sektor basis pada kabupaten tergolong sektor yang memiliki pertumbuhan yang lambat atau pun cepat, dan merupakan sektor yang memiliki daya saing ataukah tidak memiliki daya saing. Berdasarkan analisis Shift Share maka hasil yang diperoleh untuk masing-masing kabupaten di kepulauan sumba adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil perhitungan SS Kabupaten Sumba Timur Tahun 2012 – 2018

Sektor Basis	N_{ij}	M_{ij}	C_{ij}	D_{ij}
C -Industri Pengolahan	13.379.170.000	71.955.067	- 4.517.025.067	8.934.100.000
F - Konstruksi	118.520.780.000	17.262.360.760	26.458.859.240	162.242.000.000
G - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	145.527.200.000	34.708.007.497	4.998.992.503	185.234.200.000
P - Jasa Pendidikan	127.021.335.000	- 10.363.193.537	30.746.358.537	147.404.500.000

Dari empat sektor basis kabupaten sumba timur sektor industri menunjukkan bahwa pertumbuhannya cepat namun tidak memiliki daya saing. Hal ini merupakan kebalikan dengan sektor jasa pendidikan dimana sektor jasa pendidikan merupakan sektor yang pertumbuhannya lambat namun memiliki daya saing yang baik. Sedangkan sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran

termasuk dalam sektor basis yang pertumbuhannya cepat dan memiliki daya saing yang baik. Berdasarkan hasil pergeseran bersih atau D_{ij} terlihat bahwa semua hasilnya bernilai positif (+), hal ini memberikan indikasi bahwa keseluruhan sektor basis untuk kabupaten Sumba Timur tergolong progresif.

Tabel 8. Hasil perhitungan SS¹ Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2012 – 2018

Sektor Basis	N_{ij}	M_{ij}	C_{ij}	D_{ij}
A - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	80.587.664.500	-	-	44.680.890.000
B - Pertambangan dan Penggalan	6.389.866.000	- 1.002.462.113	3.352.886.113	8.740.290.000
L - Real Estate	5.296.371.500	- 1.296.881.833	852.450.333	4.851.940.000
O - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	47.894.108.500	9.442.646.683	1.493.924.817	58.830.680.000

Kabupaten sumba tengah memiliki empat sektor yang tergolong dalam sektor basis, hanya saja dari keempat sektor tersebut ketiga sektornya mengalami pertumbuhan yang lambat, namun ada yang memiliki pertumbuhan cepat. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki pertumbuhan lambat dan juga tidak memiliki daya saing sedangkan dua sektor lainnya seperti sektor pertambangan dan penggalan serta sektor real estate memiliki pertumbuhan yang lambat pula namun memiliki daya saing yang baik. Sektor Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib merupakan sektor basis pada kabupaten Sumba Tengah yang memiliki pertumbuhan cepat dan memiliki daya saing yang baik.

Tabel 9. hasil perhitungan ss¹ kabupaten sumba barat tahun 2012 – 2018

Sektor Basis	N_{ij}	M_{ij}	C_{ij}	D_{ij}
A - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	100.546.446.000	- 37.769.082.478	- 575.533.522	62.201.830.000
C - Industri Pengolahan	6.314.798.000	33.961.876	- 1.286.469.876	5.062.290.000
G - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	59.225.964.000	14.125.298.930	2.876.717.070	76.227.980.000
K - Jasa Keuangan dan Asuransi	16.714.372.500	6.872.529.508	2.393.997.992	25.980.900.000
O - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	58.822.676.500	11.597.287.611	- 313.894.111	70.106.070.000
P - Jasa Pendidikan	34.145.006.000	- 2.785.762.766	- 7.129.943.234	24.229.300.000

Kabupaten Sumba Barat memiliki Sektor basis yang lebih banyak daripada kabupaten Sumba Timur dan Sumba Tengah. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor jasa pendidikan memiliki pertumbuhan yang lambat dan tidak memiliki daya saing. Sektor industri pengolahan dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, memiliki pertumbuhan yang cepat namun tidak memiliki daya saing. Sedangkan kedua unggulan lainnya yaitu sektor perdagangan besar dan eceran dan sektor jasa keuangan memiliki pertumbuhan yang cepat dan daya saing yang baik.

Tabel 10. Hasil perhitungan SS¹ Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012 – 2018

Sektor Basis	N_{ij}	M_{ij}	C_{ij}	D_{ij}
A - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	269.652.607.000	- 101.291.810.495	- 50.339.766.505	118.021.030.000
J - Informasi dan Komunikasi	63.991.441.500	16.504.069.550	- 2.378.201.050	78.117.310.000

Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan salah satu kabupaten yang memiliki sektor basis paling sedikit yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki pertumbuhan yang lambat dan yang tidak memiliki daya saing. Sektor ini merupakan sektor yang sama yang dimiliki oleh kabupaten Sumba Tengah dan kabupaten Sumba Barat, serta sama-sama merupakan sektor basis yang pertumbuhannya lambat dan tidak memiliki daya saing. Salah satu sektor lainnya adalah sektor Informasi

dan Komunikasi yang bukan merupakan sektor basis dari ketiga kabupaten lainnya. Sektor ini memiliki pertumbuhan yang cepat namun tidak memiliki daya saing.

Kabupaten-kabupaten yang ada di kepulauan Sumba memiliki sektor basis berbeda yang memiliki pertumbuhan cepat dan daya saing yang baik, sehingga setiap kabupaten yang ada di kepulauan sumba memiliki kesempatan untuk mempertahankan sektor basis tersebut atau meningkatkan lagi sektor tersebut sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di kabupaten kepulauan Sumba. Seperti halnya di kabupaten Sumba Timur, bisa mempertahankan atau meningkatkan sektor Konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran, Kabupaten Sumba Tengah bisa mempertahankan atau meningkatkan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, kabupaten Sumba Barat sektor perdagangan besar dan eceran dan sektor jasa keuangan, kabupaten Sumba Barat Daya dengan sektor informasi dan komunikasi

SIMPULAN

Indeks Wiliamson menunjukkan bahwa kabupaten-kabupaten di kepulauan sumba memiliki ketimpangan yang rendah namun berdasarkan tipologi klasen kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya masih tergolong dalam daerah yang relatif tertinggal sedangkan Kabupaten Sumba Timur tergolong dalam daerah maju tapi tertekan. Berikutnya dengan melakukan analisis LQ dan SS maka setiap kabupaten di kepulauan sumba memiliki sektor unggulannya masing-masing yang disebut dengan sektor basis dengan memiliki pertumbuhan yang cepat dan memiliki daya saing yang baik. Sektor-sektor basis tersebut antara lain sektor Konstruksi; sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; sektor jasa keuangan dan asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2015). Aplikasi Analisis Shift Share Pada Transformasi Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Wilayah Di Sulawesi Tenggara. 165–178.
- Agusalim, Iestari. (2016). Kinerja : jurnal bisnis dan ekonomi Program Pascasarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. *Kinerja*, 20(1), 53–68. Retrieved from <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/kinerja/article/view/697/696>
- Amri, K. (2017). Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan: Panel data 8 provinsi di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Manajemen Teknologi*, 1(1), 1–11.
- Anggiat Mugabe Damanik, Zulgani, R. (2018). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 15–25.
- Cahyono, & Almujab, S. (2019). Analisis Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Subang Tahun 2017/2018. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, III(1), 58–66. Retrieved from <http://www.tjybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>
- Iswanto, D. (2015). Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Timur. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), 41–66. <https://doi.org/10.15408/sjie.v4i1.2293>
- Khairunnisa, A., & Hidayat, P. (2015). Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan Di Kota Medan. *Ekonomi Dan Keuangan*, 3(6), 448–463.
- Kurniasih, E. P. (2013). Ketimpangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat Suatu Kajian terhadap Hipotesis Kuznet. *Eksos*, 9(1), 36–48.

-
-
- Mahardiki, D., & Santoso, R. P. (2013). Analisis Perubahan Ketimpangan Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Propinsi Di Indonesia 2006-2011. *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 6(2), 103–213. <https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596>
- Mangilaleng, E. J., Rotinsuhu, D., & Rompas, W. (2015). Analisis sektor unggulan kabupaten minahasa selatan. 15(04), 193–205.
- Nugroho, B. S. (2014). Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan. *Jejak (Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan)*, 7(1), 46–59. <https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3842>
- R. Jumiyanti, K. (2018). Analisis Location Quotient dalam Penentuan Sektor Basis dan Non Basis di Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Development Review*, 1(1), 29. <https://doi.org/10.32662/golder.v1i1.112>
- Renggo, Y. R. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Pembangunan Daerah Di Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal AKRAB JUARA*, 4(3), 31–46. <https://doi.org/10.1037//0033-2909.I26.1.78>
- Saputra, D. (2016). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Creative Research Journal*, 2(1), 1–18. Retrieved from <http://crjournal.jabarprov.go.id/index.php/crj/article/view/10/8>
- Saragih, F. H., & Simanullang, E. S. (2019). Analisis Ketimpangan Pembangunan Sumatera Utara. Retrieved from <http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota> 649
- Yuliani, T. (2015). Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Kalimantan Timur. *Jejak*, 8(1). <https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3854>